

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, TINGKAT UPAH
MINIMUM KOTA, TINGKAT INFLASI DAN
BEBAN/TANGGUNGAN PENDUDUK
TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI
KOTA MAGELANG
PERIODE TAHUN 1990 - 2010**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AKBAR SISPUTRO

NIM. C2B607002

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Akbar Sisputro
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607002
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
TINGKAT UPAH MINIMUM KOTA,
TINGKAT INFLASI DAN
BEBAN/TANGGUNGAN PENDUDUK
TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN
1990 – 2010**
Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, SE., MSi.

Semarang, 6 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

(Achma Hendra Setiawan, SE., MSi.)

NIP. 196905101997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Akbar Sisputro
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607002
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
TINGKAT UPAH MINIMUM KOTA,
TINGKAT INFLASI DAN
BEBAN/TANGGUNGAN PENDUDUK
TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA
DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN
1990 – 2010**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 21 Maret 2013

Tim Penguji :

1. Achma Hendra Setiawan, SE, M.Si (.....)
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si (.....)
3. Fitri Arianti, SE, M.Si (.....)

Mengetahui
a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE, M.Com, PhD.Akt

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Akbar Sisputro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, TINGKAT UPAH MINIMUM KOTA, TINGKAT INFLASI DAN BEBAN/TANGGUNGAN PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 1990 – 2010”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil ujian saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

(Akbar Siputro)

NIM : C2B607002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MAN JADDA WA JADDA WA MAN SAARO' ALAD
DARBI WASHOLA*

“Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil, siapa yang berjalan pada jalannya, dia akan sampai di tujuan”

*Jangan pernah takut ‘tuk melangkah. Karena kesuksesan selalu menantimu di depan sana..
(quote : @mushlimhs)*

*Jadikanlah pengalaman baik menjadi sebuah kebiasaan, dan tetap kenang pengalaman buruk, untuk dijadikan pelajaran kedepannya..
(quote : @mushlimhs)*

to reach something that you never had, you have to do something that you have never done

Persembahkan Terindah buat Keluargaku di rumah, keluargaku di Perguruan tinggi, dan Seluruh keluargaku di dunia yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini..

ABSTRACT

Economic growth is a measure of the success of economic development of a region. Economic development of a region can be seen from several economic indicators, one of them is the level of unemployment. Increase in population led to rising labor force, but it is not matched with adequate number of jobs that have an impact on the growing number of unemployed. In the city of Magelang unemployment is quite high compared with cities and other districts in Central Java, which reached 13.28 percent in 2010.

The purpose of the of the study was the analyze the influence of GDP, wages, inflation, and Dependency Ratio on the enemployment rate in Magelang and analyze the factors that most strongly influence the level of unemployment in Magelang in 1990-2010. The data used are time series of quantitative secondary data obtained from the BPS during the period 1990-2010. Regression model used is the method of multiple linear regression analysis.

Based on the results of tests per out formed with simultaneous test (F test) show that overall the independent variables (GDP, inflation, wages, and Dependency Ratio) together have significant effect on the level of unemployment that occurred in Magelang. The value of R^2 amounting to 0,556 which means 55,6 percent is explanatory to the dependent variable (unemployment rate), while the remaining 44,4 percent is explained by other variables outside of the model used.

Keywords : unemployment rate, GDP, inflation, wages, and Dependency Ratio

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Meningkatnya jumlah penduduk memicu meningkatnya jumlah angkatan kerja, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang memadai sehingga berdampak kepada meningkatnya jumlah pengangguran. Di Kota Magelang tingkat pengangguran tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan Kota-kota dan Kabupaten lain di Propinsi Jawa Tengah, yaitu mencapai 13,28 persen pada tahun 2010.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tingkat PDRB, besaran upah, tingkat inflasi dan tingkat beban/tanggung penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kota Magelang dan menganalisis faktor yang paling kuat mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Magelang tahun 1990-2010. Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif runtun waktu (*time series*) yang diperoleh dari BPS selama periode tahun 1990-2010. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (PDRB, Inflasi, Upah, dan Beban/Tanggung Penduduk) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Magelang. Nilai R^2 sebesar 0,556 yang berarti 55,6 persen merupakan penjelas terhadap variabel terikat (tingkat pengangguran), sedangkan 44,4 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

Kata Kunci : Tingkat Pengangguran, PDRB, Inflasi, Upah, dan Beban/Tanggung Penduduk.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, MSi., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE., MSi. selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, nasehat, dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D. , selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Dosen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membagi ilmunya kepada penulis.

5. Ayahanda tercinta Agus Joko Siswanto, Ibunda tersayang Siti Murdiah, serta adik-adik dan kakak atas segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar tak ternilai harganya bagi penulis.
6. Duhita Amaranggana Janie, S.I.Kom. yang telah membantu dan memotivasi penulis agar segera merampungkan skripsi ini.
7. Teman-teman IESP '07 Faiz, Suhael, Rizki, Tepong, dan seluruh teman-teman IESP '07 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi terutama bagi penelitian yang sejenis.

Semarang, 6 Maret 2013

Penulis

(Akbar Sisputro)
NIM: C2B607002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	15
1.4. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	18
2.1.1. Ketenagakerjaan.....	18
2.1.2. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	23
2.1.3. Pengangguran.....	30
2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	37
2.1.5. Upah	41
2.1.6. Angka Beban/Tanggungans Penduduk.....	44
2.1.7. Inflasi	45

2.1.8. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran	48
2.2. Penelitian Terdahulu	50
2.3. Kerangka Pemikiran	57

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	61
3.1.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	61
3.1.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	62
3.2. Jenis dan Sumber Data	64
3.3. Metode Pengumpulan Data	65
3.4. Metode Analisis	65
3.4.1. Analisis Regresi Berganda.....	65
3.4.2. Deteksi Penyimpangan Terhadap Asumsi Klasik.....	66
3.4.3. Pengujian Statistik.....	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	74
4.1.1. Letak dan Kondisi Kota Magelang	74
4.1.2. Administrasi Wilayah Kota Magelang.....	75
4.1.3. Keadaan Penduduk Kota Magelang.....	76
4.1.4. Kondisi Pengangguran Kota Magelang.....	77
4.1.5. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang ..	70
4.1.6. Kondisi Tingkat Upah Kota Magelang	80
4.1.7. Kondisi Tingkat Inflasi Kota Magelang.....	82
4.1.8. Kondisi Tingkat Beban/Tanggungan Penduduk Kota Magelang	83
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	84
4.2.1. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	85
4.2.2. Pengujian Analisis Linier Berganda.....	90
4.2.3. Pengujian Hipotesis.....	92
4.3. Interpretasi Hasil dan Pembahasan	97
4.3.1. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan PDRB terhadap Pengangguran	97
4.3.2. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran	98

4.3.3. Pengaruh Tingkat Upah terhadap Pengangguran.....	99
4.3.4. Pengaruh Tingkat Beban/Tanggungans Penduduk terhadap Pengangguran	101
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	104
 DAFTAR PUSTAKA.....	 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010	7
Tabel 1.2 Laju PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Tingkat Pengangguran Tahun 2000-2010.....	9
Tabel 1.3 Upah Minimum Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran Kota Magelang 2000-2010	10
Tabel 1.4 Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Kota Magelang Tahun 2000-2010.....	11
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Usia Produktif, Non Produktif, dan Tingkat Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2000-2010	13
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kota Magelang Tahun 1990-2010	78
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 2000 dan Laju PDRB Kota Magelang Tahun 1990-2010	80
Tabel 4.3 Upah Minimum Kota Kota Magelang 1990-2010	81
Tabel 4.4 Laju Inflasi Tahun Kalender Kota Magelang 1990-2010.....	83
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Usia Produktif, Usia Non Produktif, dan Beban Tanggung/Tingkat Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 1990-2010.....	84
Tabel 4.6 Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov.....	87
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas	88
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi	90
Tabel 4.9 Model Regresi	91
Tabel 4.10 Nilai F-Statistik	93
Tabel 4.11 Nilai Koefisien Determinasi	94
Tabel 4.12 Nilai T-Statistik Pengaruh	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja	24
Gambar 2.2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja.....	27
Gambar 2.3 Kurva Hukum Okun	40
Gambar 2.4 Kurva Philips.....	47
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	57
Gambar 4.1 Uji Normalitas	86
Gambar 4.2 Pengujian Heterokedasitas	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Input Data dan Variabel

Lampiran B Hasil Regresi

Lampiran C Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistil T)

Lampiran D Hasil Uji Normalitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amri Amir, 2007).

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 1992). Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Lincoln Arsyad, 1999).

Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya memuat mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat yang dimaksud adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran,

keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa permasalahan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan. Untuk itu diperlukan adanya agenda dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain; penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta perbaikan infrastruktur penunjang.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, pengelompokan negara berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu masalah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera di atasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistika, 2007).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, menimbulkan kesulitan kepada negara-negara berkembang untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan jumlah yang sangat besar dapat

menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah tersebut adalah pengangguran. Sedangkan penambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi buruk (Sadono Sukirno, 2005). Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap daerah di Indonesia. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan

ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T.H Tambunan, 2009). Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau GDP yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GDP (*Gross Domestic Product*), yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Atau untuk skala yang lebih kecil lingkungannya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang berarti peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Todaro (1988) pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator – indikator ekonomi yang mempengaruhinya antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, tingkat inflasi, besaran upah yang berlaku di setiap daerah serta tingkat beban/tanggungannya penduduk yang bekerja.

Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja ternyata tidak diimbangi oleh tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada. Akibat dari kurangnya penyerapan tenaga kerja yang tersedia akan menimbulkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Tingkat pengangguran pada tahun 2000

hingga tahun 2010 di Kota Magelang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 10,96 persen per tahun.

Kota Magelang merupakan salah satu daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang. Kota yang hanya mempunyai luas wilayah 18,12 Km², terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan ini mempunyai jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja sebanyak 61.945 jiwa. Seperti terlihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Magelang tahun 2010 mencapai 8.226 jiwa, dengan total angkatan kerja 61.945 jiwa. Angka ini memang terlihat kecil jika dibandingkan dengan kota-kota dan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 13,28 persen. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja masih kurang karena tingkat pengangguran masih cukup tinggi.

Tabel 1.1
Jumlah Angkatan Kerja Tiap Kabupaten/Kota Di Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2010

KOTA/KAB.	Angkatan Kerja (jiwa)			TPT
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sub Jumlah	%
Kab. Cilacap	688.049	74.298	762.347	9,74
Kab. Banyumas	733.609	58.403	792.012	7,37
Kab. Banjarnegara	452.617	14.457	467.074	3,09
Kab. Kebumen	537.808	46.876	584.684	8,01
Kab. Purworejo	341.033	11.994	353.027	3,49
Kab. Wonosobo	381.326	16.066	397.392	4,04
Kab. Magelang	629.239	19.245	648.484	2,96
Kab. Boyolali	506.987	20594	527.581	3,9
Kab. Klaten	548.672	25.877	574.549	4,5
Kab. Sukoharjo	400.526	32.000	432.526	7,4
Kab. Wonogiri	495.295	24.407	519.702	4,7
Kab. Karanganyar	427.435	30.321	457.756	6,62
Kab. Sragen	463.749	19.777	483.526	4,09
Kab. Grobogan	688.296	33.179	721.475	4,6
Kab. Blora	441.334	25.643	466.977	5,49
Kab. Rembang	304.638	15.653	320.291	4,89
Kab. Pati	581.998	38.604	620.602	6,22
Kab. Kudus	394.361	26.152	420.513	6,21
Kab. Jepara	536.754	25.648	562.402	4,56
Kab. Demak	492.570	29.696	522.266	5,68
Kab. Semarang	502.705	33.499	536.204	6,24
Kab. Temanggung	396.063	14.797	410.860	3,6
Kab. Kendal	447.120	26.395	473.515	5,57
Kab. Batang	353.214	24.486	377.700	6,48
Kab. Pekalongan	401.931	16.912	418.843	4,03
Kab. Pemasang	515.127	66.630	581.757	11,45
Kab. Tegal	585.618	47.313	632.931	7,47
Kab. Brebes	812.098	72.659	884.757	8,21
Kota Magelang	53.719	8.226	61.945	13,28
Kota Surakarta	235.998	22.575	258.573	8,73
Kota Salatiga	73.329	8.345	81.674	10,22
Kota Semarang	724.687	71.499	796.186	8,98
Kota Pekalongan	134.984	10.165	145.149	7,00
Kota Tegal	107.613	17.839	125.452	14,22

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, 2010

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa akan meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang terus menunjukkan suatu peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah berkembang dengan baik.

Menurut N. Gregory Mankiw (2006) Hukum Okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi/rendahnya tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan pertumbuhan GDP dalam negara tersebut.

Pada tabel 1.2 dapat diketahui mengenai laju PDRB Kota Magelang yang dari tahun 2000 sampai tahun 2010 menunjukkan angka yang fluktuatif. Laju PDRB yang tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,12 persen dan angka terendah pada tahun 2002 yaitu mencapai 0,37 persen.

Tabel 1.2
Laju PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Tingkat Pengangguran Tahun 2000-2010

Tahun	Laju PDRB (%)	TPT (%)
2000	3,59	5.69
2001	4,96	7.37
2002	0,37	10.22
2003	3,74	10.89
2004	3,71	9.09
2005	5,78	11.24
2006	1,03	11.16
2007	5,17	12.37
2008	5,05	12.28
2009	5,11	14.95
2010	6,12	13.28
Rata-rata	4,06	10,78

Sumber : BPS Kota Magelang 2000-2010

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Gregory Mankiw, 2007).

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada

negara tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kauffman dan Hochikiss, 2000). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Tabel 1.3 menunjukkan upah minimum yang diterima oleh penduduk di Kota Magelang dari tahun 2000 hingga tahun 2010 upah yang ditetapkan oleh pemerintah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2000, upah minimum yang ditetapkan adalah sebesar 185.000 rupiah per bulan, hingga tahun 2010 upah tersebut meningkat tanpa mengalami penurunan hingga mencapai 745.000 rupiah per bulan. Peningkatan upah tersebut diikuti pula dengan tingkat pengangguran yang mengalami fluktuasi selama periode waktu tersebut.

Tabel 1.3
Upah Minimum Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran
Kota Magelang 2000-2010

Tahun	UMK (Rupiah)	TPT (%)
2000	185.000	5.69
2001	245.000	7.37
2002	336.200	10.22
2003	361.600	10.89
2004	385.000	9.09
2005	410.000	11.24
2006	485.000	11.16
2007	520.000	12.37
2008	570.000	12.28
2009	665.000	14.95
2010	745.000	13.28

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 2005). Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran
Kota Magelang Tahun 2000-2010

Tahun	Tingkat Inflasi	TPT (%)
2000	7,55	5.69
2001	8,71	7.37
2002	12,16	10.22
2003	9,89	10.89
2004	5,28	9.09
2005	14,18	11.24
2006	3,14	11.16
2007	5,9	12.37
2008	9,53	12.28
2009	3,48	14.95
2010	6,8	13.28
Rata-rata	7,87	10,78

Sumber : BPS Kota Magelang 2000-2010

Tabel 1.4 menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran Kota Magelang periode waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Tingkat inflasi yang terjadi di Kota Magelang fluktuatif, terutama di tahun 2005 tingkat inflasi yang terjadi menunjukkan angka yang paling tinggi dalam periode waktu tersebut yaitu sebesar 14,18 persen dan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 3,14 persen. Sejalan dengan laju inflasi yang

mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran juga mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,95 persen dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,69 persen.

Salah satu implikasi yang menonjol atas tingginya angka kelahiran di negar-negara berkembang adalah hampir 40 persen penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Jadi angkatan kerja produktif di negara-negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak yang proporsional jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di negara-negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). Artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif (berumur 15 sampai 64 tahun) (Michael P. Todaro, 2006).

Hal tersebut berarti di negara berkembang tidak hanya dibebani oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tetapi juga harus menanggung beban ketergantungan yang cukup berat. Seperti terlihat pada tabel 1.5 tingkat ketergantungan penduduk di Kota Magelang pada tahun 2000-2010 rata-rata mencapai 43,92 persen. Artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Magelang harus menanggung penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun) sebesar 43 sampai 44 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Usia Produktif, Usia Non Produktif, dan Tingkat
Ketergantungan Penduduk
Kota Magelang Tahun 2000 – 2010

Tahun	Usia Produktif	Usia Non Produktif		Jumlah Total (jiwa)	Tingkat Ketergantungan Penduduk (%)
	(jiwa)	(jiwa)			
	15 - 64	0 - 14	65 +		
2000	85.216	27.542	14.265	127.023	49,06
2001	90.050	27.445	11.628	129.123	43,39
2002	90.149	27.493	11.650	129.292	43,42
2003	90.359	27.560	11.683	129.602	43,43
2004	90.736	27.696	11.720	130.152	43,44
2005	91.471	27.921	11.805	131.197	43,43
2006	92.151	28.135	11.905	132.191	43,45
2007	94.166	28.574	12.153	134.893	43,25
2008	96.869	29.511	12.453	138.833	43,32
2009	97.389	29.688	12.774	139.851	43,6
2010	98.269	29.934	12.646	140.849	43,33
Rata-rata	1.016.825	311.499	134.682	1.463.006	43,92

Sumber : BPS Kota Magelang 2000-2010

1.2. Rumusan Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk memicu meningkatnya jumlah angkatan kerja, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang memadai sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GDP dan pendapatan per kapita suatu wilayah.

Jumlah pengangguran di Kota Magelang tahun 2010 mencapai 8.226 jiwa, dengan total angkatan kerja 61.945 jiwa. Angka ini memang terlihat kecil jika dibandingkan dengan kota-kota dan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah, tetapi tingkat pengangguran terbuka tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 13,28 persen. Hal ini berarti pertumbuhan angkatan kerja di Kota Magelang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja masih kurang karena tingkat pengangguran masih cukup tinggi. Pengangguran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah tingkat PDRB, tingkat inflasi, besarnya tingkat upah, dan tingkat beban/tanggungans penduduk. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Magelang.

Atas dasar permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB, tingkat inflasi, tingkat upah, dan tingkat beban/tanggungans penduduk terhadap tingkat pengangguran?
2. Faktor apakah yang paling kuat pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat PDRB, besaran upah, tingkat inflasi dan tingkat beban/tanggungannya penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kota Magelang.
2. Menganalisis faktor yang paling kuat mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Magelang.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran Kota Magelang.
2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama di kemudian hari.
3. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat pengangguran dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Magelang semakin terus meningkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menyajikan landasan teori tentang pengertian ketenaga kerjaan, teori permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengertian pengangguran, pengertian PDRB, pengertian upah, pengertian kesempatan kerja, pengertian tingkat beban tanggungan, hubungan antar variabel independen terhadap dependen yang terdiri atas pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, pengaruh tingkat PDRB, terhadap tingkat pengangguran, pengaruh kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran, pengaruh beban/tanggungan penduduk terhadap tingkat pengangguran. Di samping itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dibahas teori yang terkait dengan pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi ketenagakerjaan, penawaran dan permintaan tenaga kerja, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah, inflasi dan beban /tanggung penduduk.

2.1.1. Ketenagakerjaan

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Maupun bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja tersebut dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Payaman. J. Simanjuntak, 2001).

Di Indonesia, yang termasuk golongan tenaga kerja yaitu batas usia minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih, pemilihan 10 tahun atau sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk Indonesia berumur muda sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Tetapi Indonesia tidak menganut batas umur maksimum karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional (Payaman. J. Simanjuntak, 2001).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *labor force* dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari dua golongan yaitu (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yaitu (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya (Payaman. J. Simanjuntak, 2001).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang/jasa atau mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang mencari kerja (Mulyadi Subri, 2003).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Jawa Tengah Tahun 2008, memberikan pengertian dan definisi terhadap konsep ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2. Umur

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Perhitungan umur menggunakan pembulatan kebawah atau menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

3. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.

4. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/mengharap pekerjaan dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain pengangguran.

5. Bekerja

Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja yang tidak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi.

6. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi :

- Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- Penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha
- Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- Penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

7. Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode tertentu.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja.

9. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti:

- Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya di rumah

- Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- Lainnya, yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.

10. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:

- Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Listrik, gas dan air
- Konstruksi
- Perdagangan, rumah makan dan hotel
- Angkutan, perdagangan dan komunikasi
- Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan
- Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya

11. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja, yang dibagi dalam 8 golongan besar yaitu:

- a. Tenaga profesional
- b. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan

- c. Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha
- d. Tenaga usaha penjualan
- e. Tenaga usaha jasa
- f. Tenaga usaha pertanian
- g. Tenaga produksi dan lainnya (operator alat angkutan, tenaga kasar dll)

12. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:

- a. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
- b. Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap
- c. Berusaha dibantu buruh tetap
- d. Buruh/karyawan/pekerja dibayar

2.1.2. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

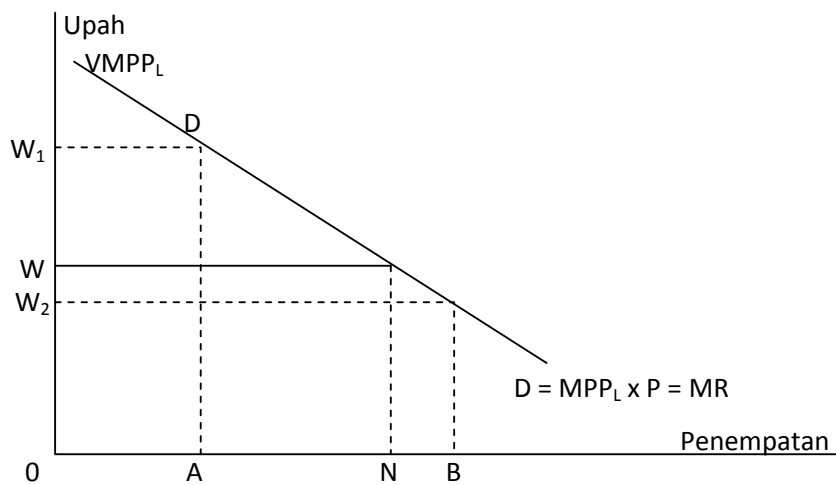
2.1.2.1. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah jumlah suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarnya dipengaruhi oleh harga komoditi itu, pendapatan nasional, harga komoditi lain dan citarasa (Salvatore, 2001). Sebuah kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kuantitas maksimal pekerja yang akan dipekerjakan pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat upah. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha dalam berbagai tingkat upah. Permintaan pengusaha akan tenaga kerja disebabkan karena pengusaha

mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja tersebut untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat.

Sebuah kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kuantitas maksimal pekerja yang akan dipekerjakan pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat upah. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha dalam berbagai tingkat upah. Permintaan pengusaha akan tenaga kerja disebabkan karena pengusaha mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja tersebut untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat.

Gambar 2.1
Kurva Permintaan Tenaga Kerja



Sumber : Payaman J. Simanjuntak, 2001

Keterangan:

MR : *Marginal revenue*, penerimaan marjinal

VMPP_L : *Value marginal physical product of labor*, nilai pertambahan hasil marjinal dari karyawan

MPP_L : *Marginal physical product of labor*

P : Harga jual barang yang diproduksi per unit

Gambar 2.1 mengilustrasikan mengenai kurva permintaan tenaga kerja. Pengusaha memiliki karyawan sebanyak 99 orang. Pengusaha akan mempertimbangkan apakah perlu menambah jumlah karyawan menjadi 100 atau menguranginya menjadi 98. Dasar yang digunakan pengusaha untuk menambah jumlah karyawan atau menguranginya adalah pengusaha akan menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau *marginal revenue*, yaitu nilai dari MPP_L dikalikan dengan harga per unit (P). Akhirnya sang pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang karyawan tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan *biaya marjinal* atau *marginal cost*. Bila tambahan penerimaan marginal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari W. Pada titik N pengusaha mendapat keuntungan.

Contoh bila tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil

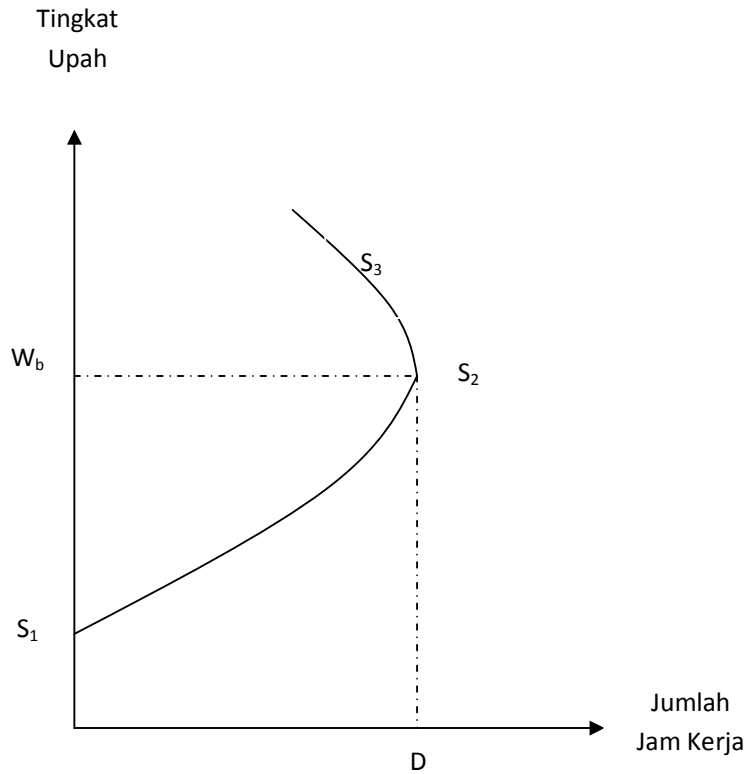
MPP_L -nya dan nilai MPP_L itu sendiri. Ini yang dinamakan *hukum diminishing returns* dan dilukiskan dengan garis DD.

Permintaan dalam tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting. Pertama, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan dalam jumlah total pekerjaan yang tersedia. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia maka permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat. Kedua, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang tersedia dalam suatu perekonomian. Permintaan tenaga kerja di sektor industri, misalnya akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan yang terjadi dalam produksi barang dan jasa pada sektor perindustrian suatu Negara (Kaufman dan Hotchkiss, 2000).

2.1.2.2. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan (Salvatore, 2001). Sebuah kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan kombinasi terhadap kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dengan kombinasi tingkat upah tertentu. Dengan kata lain, kurva penawaran tenaga kerja merupakan kombinasi dari berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah tertentu yang berlaku.

Gambar 2.2
Kurva Penawaran Tenaga Kerja



Sumber : Payaman J. Simanjuntak, 2001

Keterangan :

W_b : Tingkat upah pada harga tertentu

S_1 : Tingkat upah awal

S_2 : Titik potong

S_3 : Titik balik

D : Jumlah jam kerja seseorang pada waktu tertentu

Gambar 2.2 mengilustrasikan mengenai kurva penawaran tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah jam kerja. Kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan

(*slope*) yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.

Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu untuk bekerja seseorang bertambah bila tingkat upah bertambah (titik S_1S_2). Setelah mencapai upah tertentu (titik W_b), pertambahan upah yang semakin tinggi, jumlah jam kerja cenderung mengalami penurunan, disebut juga *backward bending supply curve*. Hal ini disebabkan karena adanya efek pendapatan yang mengalahkan efek substitusi. Dengan pendapatan yang lebih besar, seseorang akan cenderung lebih santai walaupun setiap jam kerja yang digunakan untuk bersenang-senang sebenarnya merupakan kerugian karena kehilangan pendapatan yang tinggi. Kondisi ini mulai terjadi pada titik $S_2 S_3$ pada gambar. Titik S_2 disebut titik belok dan titik W_b disebut tingkat upah dimana kurva penawaran membelok.

Tenaga kerja merupakan faktor input bagi produksi barang dan jasa, oleh karena itu, kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam tingkat produksi dan tingkat pertumbuhan perekonomian Negara. Kuantitas dari penawaran tenaga kerja sangat tergantung pada, misalnya besarnya populasi penduduk suatu wilayah, proporsi dari jumlah penduduk yang ingin bekerja dan jumlah jam kerja per tahun. Sedangkan kualitas dari penawaran tenaga kerja sangat tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan kondisi kesehatan dari angkatan kerja (Kaufman dan Hotchkiss, 2000).

Terdapat tren perubahan yang terjadi dalam penawaran tenaga kerja dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yang berbeda. Pertama,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu menggambarkan sebagian dari populasi penduduk yang ada (kecuali penduduk yang berada di penjara dan di rumah sakit jiwa) dan berusia lebih dari 16 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Kedua, adanya proporsi yang sangat kecil (cenderung berkurang) pada pria dalam angkatan kerja saat ini, yang digantikan dengan jumlah proporsi yang cukup besar bagi angkatan kerja wanita. Ketiga, adanya peningkatan yang sangat cepat dalam tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja (Kaufman dan Hotchkiss, 2000).

2.1.2.3. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Keseimbangan (*equilibrium*) merupakan suatu kondisi pasar yang ingin sekali dicapai, cenderung untuk bertahan (Salvatore, 2001). Hal ini dapat terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada pasar tenaga kerja, keseimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah upah yang diminta sama dengan jumlah upah yang ditawarkan.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (2000) keseimbangan pada pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh proses yang terjadi di dalam pasar tenaga kerja. Proses tersebut dipengaruhi oleh tiga kekuatan, antara lain:

1. Kekuatan Pasar

Proses yang digunakan untuk mempengaruhi harga dan alokasi tenaga kerja adalah kekuatan pasar pada penawaran dan permintaan dalam proses tenaga

kerja. Pada sisi permintaan, pasar tenaga kerja adalah perusahaan-perusahaan dan berbagai perusahaan non-profit seperti pemerintah. Permintaan tenaga kerja merupakan *derived demand* yaitu turunan dari permintaan pada barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dari sisi penawaran, pasar tenaga kerja menunjukkan sejumlah orang yang bekerja atau sedang mencari kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi turunan dari permintaan individu atau rumah tangga pada pendapatan untuk menghasilkan barang / jasa yang diproduksi oleh perusahaan.

2. Kekuatan Internasional

Faktor kedua yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah kekuatan institusional atau kelembagaan. Kekuatan institusional (ini menggambarkan pengaruh pada berbagai organisasi seperti serikat, pemerintahan dan sebuah korporasi pada penetapan harga tenaga kerja serta distribusi tenaga kerja.

3. Kekuatan Sosiologis

Faktor ketiga yang mempengaruhi hasil pasar tenaga kerja adalah kekuatan sosiologis, yang menggambarkan adanya pengaruh pada kelompok sosial dan nilai-nilainya pada penetapan tingkat upah dan alokasi tenaga kerja. Faktor penting lainnya seperti latar belakang keluarga, budaya, diskriminasi dan kebiasaan juga sangat mempengaruhi.

2.1.3. Pengangguran

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Mulyadi Subri, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (2007) bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah

ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001), di negara yang sedang berkembang, pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Pengangguran yang Kelihatan (*Visible Underemployment*)

Pengangguran yang kelihatan akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan untuk bekerja.

b. Pengangguran Tak Kentara (*Invisible Underemployment*)

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor/perusahaan lain tanpa mengurangi output.

c. Pengangguran Potensial

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada *disguised unemployment*, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output, hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan pembentukan capital yang berarti.

Pengangguran dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara misalnya menurut wilayah geografis, jenis pekerjaan dan alasan mengapa orang tersebut menganggur. Berikut jenis pengangguran menurut sifat dan penyebabnya:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah perubahan dalam komposisi seluruh permintaan dan oleh karena masuknya kedalam pasar tenaga kerja para pencari kerja pertama kalinya yang informasinya tidak sempurna dan membutuhkan biaya modal (Payaman. J. Simanjuntak, 2001).

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktural komposisi perekonomian (Payaman. J. Simanjuntak, 2001). Sedangkan menurut Mulyadi Subri (2003) pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasi dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

c. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi karena kurangnya permintaan. Pengangguran ini terjadi apabila pada tingkat upah dan harga yang berlaku, tingkat permintaan tenaga kerja secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaganya (Payaman. J. Simanjuntak, 2001).

d. Pengangguran Musiman

Bentuk pengangguran lain sering kali muncul di sektor pertanian di Negara berkembang adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman

adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya, pengangguran musiman terjadi pada saat pergantian musim. Pengangguran musiman bersifat sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu (Sadono Sukirno, 2005).

e. Pengangguran Terpaksa dan Pengangguran Sukarela

Pada tingkat keseimbangan yang diciptakan oleh para pasar kompetitif. Perusahaan-perusahaan akan mau mempekerjakan semua pekerjaan yang memenuhi kualifikasi dan mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Pengangguran yang terjadi kalau ada pekerjaan yang tersedia, tetapi orang yang menganggur tidak bersedia menerimanya pada tingkat upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut disebut pengangguran sukarela (Payaman. J. Simanjuntak, 2001). Mereka menganggur dengan sukarela karena mereka dapat memperoleh pekerjaan, tetapi tidak mau menerimanya karena mereka tidak berhasil memperoleh suatu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat gaji yang diinginkan. Selain itu para pencari kerja yang menganggur sukarela, kemungkinan karena mereka memilih untuk menikmati hidup untuk bersenang-senang atau melakukan kegiatan lain daripada bekerja dengan tingkat upah yang berlaku di pasaran (Samuelson, 2001).

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 2005) :

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam

perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan

mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*. Pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal (Kaufman dan Hotckiss, 2000) :

a. Proses mencari kerja

Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi tingkat pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke

pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima, dan sebagainya.

b. Kekakuan upah

Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya, akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan adanya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai inflasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi.

c. Efisiensi upah

Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja (walaupun akan muncul juga kondisi dimana terjadi *diminishing rate*). Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran terpaksa akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sadono Sukirno, 2005).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau propinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas harga dasar berlaku maupun atas harga dasar konstan. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk lebih jelas dalam penghitungan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto, ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi di atas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.

Dalam penelitian ini PDRB diinterpretasikan menurut pendekatan produksi. Dalam perhitungan yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari produksi atau *value added* yang diciptakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perhitungan dua kali, disamping itu juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam menciptakan produk nasional. Alasan ini yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah karena data statistik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pendekatan produksi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Dalam penyajiannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk yaitu:

1. Atas Dasar Harga Konstan

Yaitu PDRB dihitung menurut harga tetap, dengan cara menilai kembali (mendeflasikan) berdasarkan pada harga-harga pada tahun dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

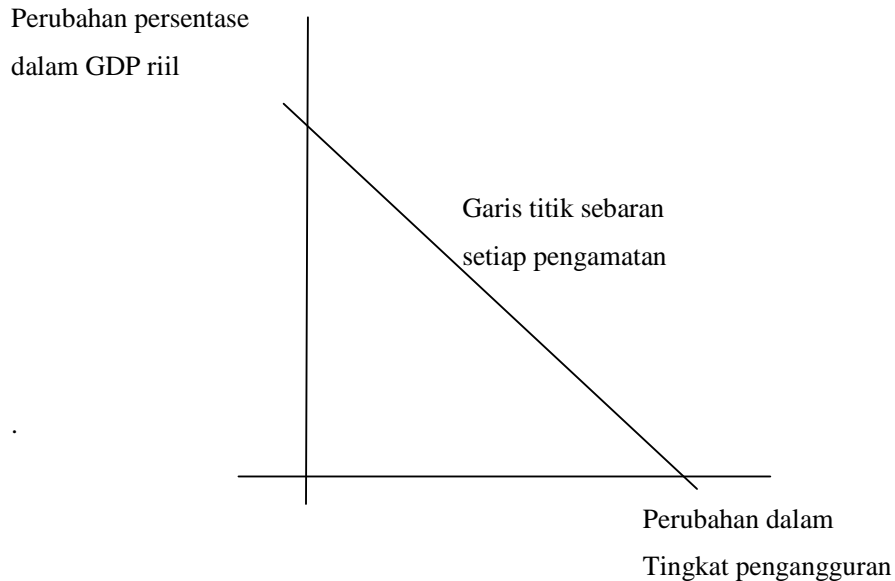
2. Atas Dasar Harga Berlaku

Yaitu PDRB yang didasarkan atas dasar harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti belum diperhitungkan perubahan harga atau

perkembangan ekonomi yang terjadi saat itu, antara lain pengaruh inflasi misalnya.

Seseorang ahli ekonomi, Okun yang memperkenalkan Hukum Okun (Mankiw, 2007) menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP (*Gross Domestic Product*) riil, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dengan GDP riil. Okun menggunakan data tahunan dari Amerika Serikat untuk menunjukkan hukum Okun ini seperti terlihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3
Kurva Hukum Okun



Sumber : Mankiw, 2007

Gambar 2.2 di atas ini merupakan titik sebar dari perubahan dalam tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase dalam GDP riil pada sumbu vertikal. Gambar ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan

dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar pengamatan yang berslope negatif.

2.1.5. Upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (Badan Pusat Statistik, 2008).

Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan "upah" untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003).

Sistem upah menurut Gilarso (2003) :

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dll.).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa; administrasinya pun dapat sederhana. Di samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan

ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and motion study*.

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah PT mendapat *tantieme*; bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

2.1.6. Angka Beban / Tanggungan Penduduk

Daryono Soebagiyo, dkk (2005) memberikan pengertian mengenai beban tanggungan penduduk (BTP), yaitu merupakan perhitungan jumlah penduduk yang ditanggung oleh setiap penduduk usia kerja, dimana penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk usia 15-64 tahun dan dikali dengan seratus, dengan satuan persen. Menurut Ida Bagoes Mantra (2000) kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok produktif dan kelompok penduduk umur 65 tahun keatas sebagai kelompok penduduk yang tidak lagi produktif.

Tingginya angka Rasio Beban Tanggungan Penduduk merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum produktif. Negara-negara yang sedang berkembang dengan tingkat fertilitas yang tinggi, mempunyai angka rasio beban tanggungan yang tinggi, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk tersebut.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001) pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh adanya tiga faktor yang dominan, yaitu:

1. Angka Kelahiran

Angka kelahiran akan berpengaruh pada tingginya pertumbuhan penduduk dalam suatu Negara. Hal ini, antara lain, dipengaruhi oleh peningkatan pendidikan wanita, penundaan usia kawin, dan lain sebagainya. Semakin tinggi angka

kelahiran dalam suatu Negara maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan penduduk Negara tersebut.

2. Angka Kematian

Angka kematian dapat dipengaruhi pertumbuhan penduduk melalui adanya tiga faktor, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup saat lahir dan penduduk lanjut usia. Jika angka kematian semakin tinggi maka akan berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah

3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap, seperti mobilitas ulang-alik (komutasi) dan migrasi. Melalui besarnya mobilitas penduduk dalam suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk dalam suatu Negara (terkait dengan mobilitas antara Negara).

2.1.7. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 2005). Dalam perekonomian seringkali besarnya tingkat inflasi berkisar antara 2 sampai 4 persen per-tahun, inflasi ini tergolong inflasi dalam inflasi merayap. Sering kali inflasi yang terjadi lebih serius, yang besarnya antara 5 hingga 10 persen per-tahun. Dalam keadaan tertentu, inflasi juga dapat mencapai ratusan bahkan ribuan persen

per-tahun sebagai akibat resesi ekonomi atau sebab-sebab lain, inflasi ini tergolong dalam inflasi hiper.

Menurut Sadono Sukirno (2005) berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Hal ini mengakibatkan permintaan masyarakat akan bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang terwujud akan menimbulkan kenaikan pada harga-harga.

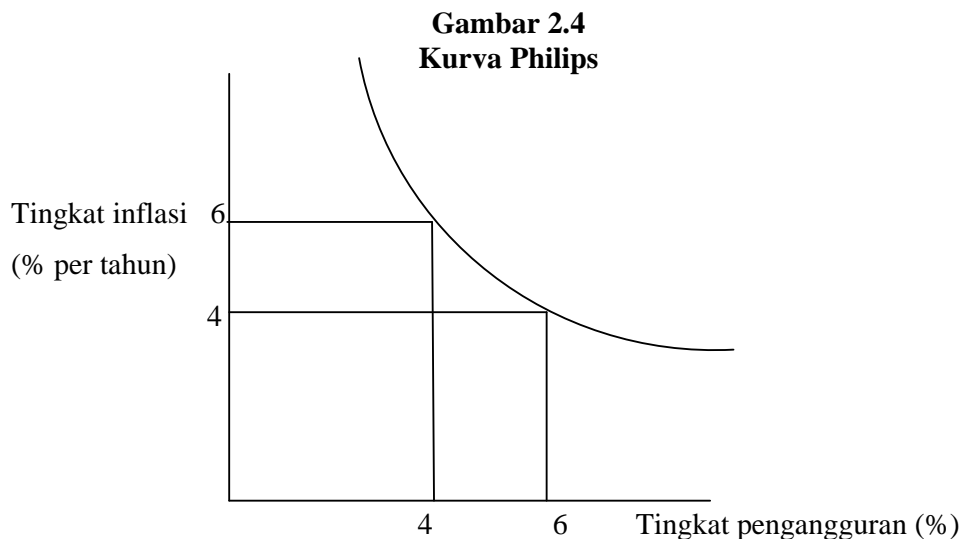
2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Penambahan biaya produksi akan mendorong peningkatan harga walaupun akan menghadapi resiko pengurangan terhadap permintaan barang yang diproduksinya. Inflasi ini akan berkaitan pada kenaikan harga serta turunnya produksi yang akan menimbulkan adanya resesi perekonomian.

Boediono (2005) menggolongkan inflasi menjadi 4 macam berdasarkan parah tidaknya inflasi tersebut terjadi.

- 1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- 4) Hiperinflasi (diatas 100%)

Dalam Amri Amir (2007), menjelaskan bahwa teori A.W. Phillips muncul karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi Amerika Serikat, hal ini berdampak pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan Kurva Phillip.



Sumber : Amri Amir, 2007

Berdasarkan gambar 2.4 A.W Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk

memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang.

2.1.8. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran

Adapun variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah variabel tingkat upah, variabel tingkat PDRB, variabel tingkat inflasi serta variabel tingkat beban tanggungan penduduk (*dependency ratio*).

2.1.8.1. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (2000). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson (2001), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*).

2.1.8.2. Pengaruh Tingkat PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran

Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus (2001). Hal ini didasarkan pada Hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu Negara. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen.

2.1.8.3. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Akibatnya dengan tingkat bunga yang tinggi akan

mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif (Sadono Sukirno, 2005).

Hal ini akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang rendah karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Karena adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva Phillip dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah (Nopirin, 2000).

2.1.8.4. Pengaruh Tingkat Tingkat Beban/Tanggung Terhadap Tingkat Pengangguran

Menurut Ida Bagoes Mantra (2004), menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin buruk beban tanggungan penduduk, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum produktif. Negara-negara yang sedang berkembang dengan tingkat fertilitas yang tinggi, mempunyai angka rasio beban tanggungan yang tinggi, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran telah banyak dilakukan antara lain:

1. Farid Alghofari (2010) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu tingkat pengangguran dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, GDP serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Daryono Soebagiyo, dkk (2005) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu tingkat pengangguran dipengaruhi oleh beban/tanggungannya penduduk, kesempatan kerja serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Amri Amir (2007) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Risa Aditya Surya (2011) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu PDRB, inflasi, beban tanggungan penduduk dan tingkat pengangguran serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini.
5. Fitra Kincaka Rizka (2007) kaitannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu tingkat pengangguran dipengaruhi oleh upah, GDP, inflasi, beban tanggungan penduduk serupa dengan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis, Tahun	Metode Penelitian	Hasil
<p>1. Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007 (Farid Alghofari, 2010)</p>	<p>Variabel dependen : Tingkat pengangguran, Variabel independen: jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi melalui GDP.</p> <p>Alat analisis : metode kuantitatif dengan studi yang diterapkan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi</p>	<p>Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran. Mengadaptasi dari kurva Phillips, menunjukkan bahwa analisis kurva Phillips yang</p>

		menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan pengangguran tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan barang-barang, bukan kenaikan permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi.
2. Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Beban/Tanggung Jawab, dan Pendidikan terhadap Pengangguran Di Propinsi Dati I Jawa Tengah (Daryono Soebagiyo, Maulidyah Indira Hasmarini, dan Chuzaimah, 2005)	Variabel dependen: Tingkat pengangguran Variabel independen: kesempatan kerja, beban/tanggung jawab penduduk dan pendidikan Alat analisis : Model harapan dan <i>adaptif</i> yaitu model rasional yang dikemukakan oleh <i>Nerlove</i> (Gujarati, 1999) PAM (<i>Partial Adjustment Model</i>).	Pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan memiliki signifikansi terhadap tingkat pengangguran yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sedangkan hasil uji t pada uji statistik menunjukkan menunjukkan hasil bahwa variabel BPT, kesempatan kerja dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran.

<p>3. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia (Amri Amir, 2007).</p>	<p>Variabel dependen : tingkat pengangguran</p> <p>Variabel Independen : inflasi, pertumbuhan ekonomi (GDP) .</p> <p>Alat analisis : Regresi linear berganda</p>	<p>Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan Menurun sekitar 0,46%. Maka, penggambaran kurva phillips yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 – 2005 ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara inflasi dengan tingkat pengangguran</p>
--	--	--

<p>4. Analisis Tingkat pengangguran Di Kota Semarang (Riza Aditya Surya, 2011)</p>	<p>Variabel dependen : Tingkat pengangguran</p> <p>Variabel independen : Tingkat PDRB, tingkat inflasi, angka BTP (Beban/Tanggungans Penduduk)</p> <p>Alat analisis : Regresi linear berganda</p>	<p>Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (PDRB, Inflasi, dan Beban Tanggungan Penduduk) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Semarang.</p> <p>Nilai R_2 sebesar 0,964 yang berarti sebesar 96,4 persen merupakan penjelas terhadap variabel dependen. Sedangkan 3,6 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.</p>
--	---	---

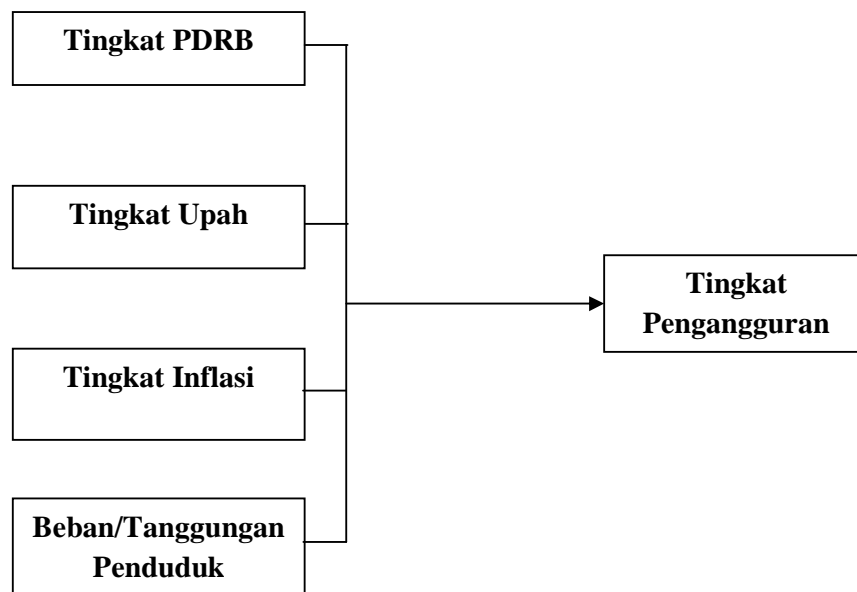
<p>5. Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia, Fitra Kincaka Rizka, 2007</p>	<p>Variabel dependen : Tingkat pengangguran. Variabel independen : upah, beban/tanggungan penduduk, tingkat inflasi, tingkat GDP . Alat analisis : Uji analisis berganda.</p>	<p>Hasil penelitian ini tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor pada variabel independennnya. Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan, variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel pertumbuhan GDP berpengaruh positif dan tidak signifikan.</p>
--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengangguran dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah tingkat pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, besarnya tingkat upah, dan tingkat beban/tanggungan penduduk.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis seperti gambar 2.5.

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pemikiran diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat upah, tingkat PDRB, tingkat inflasi dan tingkat beban/tanggungan penduduk akan mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran. Perubahan yang terjadi baik pada tingkat upah, tingkat PDRB, tingkat inflasi maupun pertumbuhan penduduk akan

mengakibatkan perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran di Kota Magelang.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001) Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu Negara. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen (Samulson, 2001).

Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Akibatnya dengan tingkat bunga

yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif (Sadono Sukirno, 2005)

Menurut Ida Bagoes Mantra (2004) Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin buruk beban tanggungan penduduk, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum produktif. Negara-negara yang sedang berkembang dengan tingkat fertilitas yang tinggi, mempunyai angka rasio beban tanggungan yang tinggi, dikarenakan besarnya proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk tersebut.

Dari kerangka pemikiran teoritis tersebut maka posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai penelitian yang baru dengan menggabungkan berbagai variabel yang mempengaruhi pengangguran yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dalam penelitian ini hipotesis yang dapat ditarik yaitu :

1. Diduga terdapat pengaruh yang negatif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi jumlah PDRB suatu wilayah maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang.
2. Diduga terdapat pengaruh yang positif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi tingkat inflasi akan berpengaruh pada tingginya tingkat pengangguran.
3. Diduga terdapat pengaruh yang positif antara tingkat upah dengan tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diterima maka akan berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin meningkat.
4. Diduga terdapat pengaruh positif antara besarnya tingkat beban/tanggungan penduduk dengan tingkat pengangguran, bahwa semakin tinggi tingkat beban/tanggungan penduduk suatu wilayah maka tingkat pengangguran akan semakin meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara kerja atau prosedur mengenai bagaimana kegiatan penelitian yang akan dilakukan dalam mengumpulkan dan memahami objek-objek yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan.

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti (Moh. Nazir, 2003). Jadi variabel penelitian ini meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

3.1.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Magelang. Menurut Badan Pusat Statistik (2007) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

3.1.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

1. Tingkat Upah

Variabel tingkat upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran karena tingkat upah yang diterima oleh pencari kerja akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu dengan asumsi untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi. Penentuan tingkat upah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan tingkat Upah Minimum Kota (UMK) Kota Magelang dengan satuan rupiah.

2. Tingkat PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dari suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

PDRB diukur dari PDRB riil Kota Magelang berdasarkan harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam satuan rupiah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2010. PDRB ini menunjukkan nilai barang dan jasa yang diproduksi yang dihitung atas dasar harga konstan 2000 agar menjadi sama tahun dasarnya, dengan cara mencari nilai indeks implisit yang baru terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut (BPS, 2010) :

$$\text{Indeks Implisit} = \frac{\text{Indeks Implisit lama}}{\text{Indeks Implisit tahun dasar (2000)}} \times 100 \%$$

Indeks Implisit ini digunakan untuk mencari PDRB harga konstan tahun 2000. Kemudian PDRB riil tahun 1990 sampai dengan 2010 atas dasar harga konstan 2000 didapat dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan Indeks Implisit baru masing-masing tahun.

Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 per tahunnya yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran yang terjadi. Tingkat inflasi menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu. Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata tingkat inflasi yang terjadi di Kota Magelang berdasarkan tahun kalender pada periode satu tahun tertentu (*year one year*) dengan satuan persen.

4. Tingkat Beban/Tanggungans Penduduk.

Variabel beban/tanggungans penduduk ini diukur melalui presentase perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif terdiri dari penduduk dengan usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Sedangkan penduduk usia produktif terdiri dari penduduk dengan usia 15-64 tahun.

Perhitungan presentase beban/tanggungan penduduk dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dependency Ratio} = \frac{\text{usia 0-14 tahun} + \text{usia} \geq 65 \text{ tahun}}{\text{usia 15-64 tahun}} \times 100\%$$

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data kuantitatif ini berupa data runtun waktu (*time series*) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur baik buku, jurnal penelitian, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu.

Data yang diperlukan dalam penelitian in antara lain adalah:

1. Data mengenai besarnya tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kota Magelang
2. Data mengenai besarnya tingkat upah minimum Kota Magelang
3. Data mengenai besarnya tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kota Magelang
4. Data mengenai tingkat inflasi Kota Magelang
5. Data mengenai tingkat beban/tanggungan penduduk Kota Magelang

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan deteksi penyimpangan terhadap asumsi klasik yang meliputi deteksi multikolinearitas, deteksi autokolerasi, dan deteksi heterokedastisitas.

3.4.1. Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Magelang, digunakan model:

$$TP = \beta_0 + \beta_1 UMK + \beta_2 PDRB + \beta_3 Inf + \beta_4 BTP + u$$

Dimana:

TP : Tingkat Pengangguran Kota Magelang (%)

UMK : Tingkat Upah Minimum Kota Magelang (rupiah)

PDRB : Tingkat PDRB Kota Magelang (%)

Inf : Tingkat Inflasi Kota Magelang (%)

BTP : Beban/Tanggungannya Penduduk (%)

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien Upah

β_2 : Koefisien PDRB

β_3 : Koefisien Inflasi

β_4 : Koefisien Beban/Tanggungannya Penduduk

u : Faktor Pengganggu

Untuk mengetahui derajat kepekaan tingkat pengangguran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, digunakan konsep elastisitas. Besarnya nilai elastisitas dalam model ini dapat diketahui langsung besarnya nilai koefisien regresi variabel-variabel pendukungnya (Gujarati, 2006).

3.4.2. Deteksi Penyimpangan Terhadap Asumsi Klasik

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik model OLS, sehingga model tersebut layak digunakan. Tujuannya agar diperoleh penaksiran yang berifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi tidak adanya multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokolerasi pada hasil estimasi, karena apabila terjadi penyimpangan maka uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid.

3.4.2.1. Deteksi Multikolinearitas

Satu dari asumsi regresi linier klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model (Gujarati, 2003). Multikolinearitas berarti ada hubungan atas pasti diantara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah :

- a. Mudrajat Kuncoro (2003), menyatakan bahwa multikolinearitas terjadi apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi salah satu atau kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat.
- b. Gujarati (2003) lebih tegas mengatakan, bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius.

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (kolerasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi menggunakan Auxilliary Regression yaitu dengan membandingkan besar nilai R^2 model utama dengan R^2 variabel-variabel independennya secara partial. Jika R^2 model utama lebih besar daripada R^2 variabel-variabel independennya maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2006).

3.4.2.2. Deteksi Autokolerasi

Autokolerasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkolerasi dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokolerasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, dan atau memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokolerasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dari variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2006).

Pada penelitian ini ntuk mendeteksi adanya autokorelasi, dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah (Mudrajaat Kuncoro, 2003) :

- a. Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (*upper bound, U*), maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol. Artinya tidak ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound, L*) maka koefisien autokorelasi lebih besar sama dengan nol. Artinya, ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW terletak antara batas atas dan batas bawah maka tidak dapat disimpulkan.

3.4.2.3. Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi menjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2001).

Heterokedastisitas yaitu variable pengganggu (e) memiliki varian yang berbeda dari satu obeservasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi heterokedastisitas yaitu setiap variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Heterokedastisitas lebih sering muncul pada data *cross section* dibandingkan data time series (Mudrajat Kuncoro, 2003).

Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode Glejser. Metode ini melakukan regresi antara nilai absolute dari setiap variabel independen. Apabila koefisien regresi tersebut signifikan maka terdapat heterokedastisitas di dalam data (Gujarati, 2003).

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji park (Gujarati, 2003). Bentuk fungsi yang digunakan adalah e_i^2 sebagai pendekatan dan melakukan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln e_i^2 &= \ln \sigma^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= a + \beta \ln X_i + v_i \end{aligned}$$

Jika β secara signifikan (penting) secara statistik, maka data terdapat heterokedastisitas, apabila ternyata tidak signifikan, maka bisa menerima asumsi homoskedastisitas.

3.4.3. Pengujian Statistik

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

3.4.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase, nilai R^2 ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur proporsi (bagian) total variasi dalam variabel tergantung yang dijelaskan dalam regresi atau untuk melihat seberapa baik variabel bebas mampu menerangkan variabel tergantung (Gujarati, 2003).

Nilai R^2 dirumuskan :

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum_1 Y_1 X_1 + \beta_2 \sum_2 Y_2 X_2 + \beta_3 \sum_3 Y_3 X_3 + \beta_4 \sum_4 Y_4 X_4}{\sum Y_1^2}$$

R^2 merupakan bilangan non negative yang merupakan batas $0 < R^2 < 1$.

Kaidah keputusan R^2 :

1. Jika nilai R^2 mendekati nol, berarti antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak ada keterkaitan.
2. Jika nilai R^2 mendekati satu, berarti antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh ada keterkaitan.

Kaidah penafsiran nilai R² adalah apabila nilai R² semakin besar, maka proporsi total dari variabel penjelas semakin besar dalam menjelaskan variabel tergantung, dimana sisa dari nilai R² menunjukkan total variasi dari variabel penjelas yang tidak dimasukkan dalam model.

3.4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel bebas independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \dots = 0$$

$$H_1 : \text{salah satu variabel} \neq 0$$

Untuk menguji kedua hipotesis tersebut digunakan nilai statistik F, yaitu :

$$F = \frac{R^2 / (K-1)}{(1 - R^2) / (N-K)}$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi ganda

F = F_{hitung}

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

1. Terima H_0 jika nilai F statistik < nilai F tabel, artinya semua variabel bebas bukan merupakan penjelasan signifikan terhadap variabel tidak bebas.
2. Terima H_1 jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya semua variabel bebas merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

3.4.3.3. Uji Signifikasi Parameter (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2004) :

$$T_{hitung} = \frac{\beta_1}{S_e(\beta)}$$

Dimana :

β_1 = Koefisien regresi

S_e = Standart Deviasi

Kriteria pengujian

$H_0 : b_0 = 0$

$H_0 : b_1 > 0$

Cara melakukan uji t melali pengambilan keputusan sebagai berikut :

Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 10 persen (probability $< 0,1$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan derajat keyakinan 10 persen (probability $> 0,1$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.